

**MAKNA AKTA YANG DIBUAT OLEH CALON NOTARIS MAGANG
PASAL 16A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS.**

JURNAL



Disusun Oleh:

I Komang Suardana S.H

126010200111018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

**MAKNA AKTA YANG DIBUAT OLEH CALON NOTARIS
MAGANG PASAL 16A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

I Komang Suardana¹, Sihabudin², A.Rachmad Budiono³

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: Mank_torym@yahoo.com

Abstraction

The addition of Article 16A (2) of the prospective notary internship in law No. 2 of 2014 on the notary office, in the article there is a phrase that is confusing, that the phrase "secret deed that made", thus, the problem arises as to what the meaning of the deed made by a notary candidate as the article 16A (2) UUNJ. This study aimed to see whether Article 16A (2) gives authority to the prospective notary deed. The method used in this thesis is a normative study by using the approach of legislation. In addition, the processing method used historical and systematic interpretation of the law. Based on the research results, it can be concluded that the meaning of section 16A (2) that the prospective notary shall keep didrafnya deed or deed drafted by a notary candidates which the certificate is provided by the work of a candidate notary notary do an internship. In accordance with the systematic and historical interpretation it is found that Article 16A (2) UUNJ not give authority to the prospective notary deed because there is no article that supports the authority. Candidates notary only assist in conceptualizing or mendrafkan Notary deed.

Key words: *meaning of Section 16A Clause (2) of Law No. 2 Year 2014 About Notary*

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

ABSTRAKSI

Penambahan Pasal 16A ayat (2) mengenai calon notaris magang dalam undang-undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, dalam pasal tersebut terdapat frasa yang membingungkan, yaitu frasa “merahasiakan akta yang dibuatnya”, dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai apa makna akta yang dibuat oleh calon notaris sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2) UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pasal 16A ayat (2) tersebut memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu dalam pengolahan digunakan metode interpretasi hukum historis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa makna pasal 16A ayat (2) yaitu calon notaris wajib merahasiakan akta yang didrafnya atau akta yang dikonsep oleh calon notaris yang mana akta tersebut merupakan pekerjaan yang diberikan oleh notaris tempat calon notaris melakukan magang. Sesuai dengan penafsiran sistematis dan historis maka ditemukan bahwa Pasal 16A ayat (2) UUJN tidak memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris karena tidak ada pasal yang mendukung kewenangan tersebut. Calon notaris hanya membantu Notaris dalam mengkonsepkan atau mendrafkan akta.

Kata kunci: makna Pasal 16A Ayat (2) Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Latar Belakang

Dunia notaris saat ini berkembang sangat pesat ini dapat dibuktikan dengan jumlah notaris di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, disamping itu juga banyak universitas negeri maupun swasta yang membuka program studi kenotariatan. Perkembangan ini akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dan dapat lebih selektif dalam menentukan siapa notaris yang ditunjuk dalam menangani akta yang akan dibuatnya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat outentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hokum,⁴ dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUJN, yang dalam hal ini adalah menteri hukum dan hak asasi manusia. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan pasal 3 UUJN yaitu harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

⁴ Habib hadjie, **Hukum Notaris Indonesia tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarie**, Pt Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 2.

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 UUJN. Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-pristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁵.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari para pihak itu sesuatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam suatu akta. Kekuatan yang sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa agar suatu akta disebut otentik maka akta tersebut harus memenuhi dua persyaratan yaitu; akta otentik dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang,⁶ sejalan dengan pendapat Philipus M. Hajon tersebut maka menurut peneliti, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta, tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat dihadapan pejabat notaris saja, namun cara pembuatan akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN yaitu pasal 38 UUJN.

Munculnya undang-undang baru No. 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, membuat Penulis tertarik bahasan tentang calon notaris magang, Kewajiban calon notaris magang merupakan salah satu syarat atau tahap untuk menjadi notaris, dan masih terdapat syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh calon notaris selain magang sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 undang-undang jabatan notaris.

⁵ Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.99.

⁶ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 126.

Terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang dalam undang-undang No 2 tahun 2014, tambahan pasal tersebut yaitu pasal 16A, dalam ayat (2) diatur tentang kewajiban notaris magang atas akta yang dibuatnya, yang mana dalam undang-undang no 40 tahun 2004 tidak dicantumkan mengenai ketentuan tentang kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 16A UUJN yang baru.

Pasal 16A ayat (1) menyebutkan kewajiban notaris magang yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan:

“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Bunyi Pasal 16A ayat (2) tersebut diatas, terdapat frasa yang membingungkan, yaitu frasa “calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta”, dari bunyi pasal diatas jika dimaknai dengan membaca, dan tanpa dilakukan penafsiran terlebih dahulu maka menurut hemat penulis dapat diartikan bahwa notaris magang bisa membuat akta dan berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, jika hal penafsiran awal penulis ini benar maka tentunya terdapat pertentangan norma antara pasal 16A ayat (2) dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) UUJN tentang kewenangan notaris karena notaris yang mempunyai wewenang membuat akta bukan calon notaris.

Kewenangan pembuatan akta oleh notaris terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik, hal ini juga diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) UUJN, yang berbunyi yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan uraian pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) diatas jelas disebutkan bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, bukan notaris magang sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 A ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu permasalahan mengenai makna akta pasal 16 A ayat (2) UUDN serta apakah pasal 16A ayat (2) tersebut memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris.

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui memahami serta menganalisis makna akta yang dibuat oleh calon notaris, yang terdapat dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk mengetahui memahami serta menganalisis apakah pasal 16A ayat (2) UUDN memberikan kewenangan pembuatan akta otentik kepada calon notaris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dalam hal ini makna pasal 16A ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum yang ada tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan historis. Metode ini dipakai untuk melihat bagaimana kaitannya pasal 16A ayat (2) dengan pasal-pasal lain, serta metode historis dipakai untuk melihat apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh pembuat undang-undang berkaitan dengan pasal 16A ayat (2) UUDN.

Pembahasan

1. Makna Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain, hal inilah yang menjadi latar belakang dan tujuan munculnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Materi muatan yang akan diatur dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Notaris Pengganti Khusus

Penghapusan ketentuan Notaris pengganti khusus dengan alasan bahwa keberadaan Notaris pengganti khusus pada saat ini tidak relevan lagi mengingat wilayah kerja Notaris ada pada satu provinsi dan jumlah Notaris sudah cukup banyak.

2. Perpanjangan waktu magang bagi calon Notaris dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris

Dalam ketentuan ini, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*). Selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.

3. Usia pensiun Notaris

Usia pensiun Notaris dirumuskan menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun tanpa perpanjangan. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dihapus. Penghapusan ketentuan ini bukan untuk menghapuskan kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun hanya untuk memberikan kepastian hukum yang seringkali dimaknai secara otomatis. Dengan penghapusan ketentuan ini, kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tidak

hilang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat seluruh akta yang diinginkan para pihak sepanjang kewenangan tersebut tidak didelegasikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

5. Kewenangan Notaris Membuat akta Risalah Lelang

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta risalah lelang dihapus. Penghapusan ketentuan ini bukan untuk menghapuskan kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang, namun hanya untuk memberikan kepastian hukum yang selama ini seringkali dimaknai secara otomatis. Dengan penghapusan ketentuan ini, kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang tidak hilang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat seluruh akta yang diinginkan para pihak sepanjang kewenangan tersebut tidak didelegasikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

6. Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara

Bagi Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara, Notaris yang bersangkutan tidak lagi menunjuk Notaris Pengganti. Notaris dimaksud berkewajiban untuk menyerahkan protokol kepada majelis pengawas dan majelis pengawaslah yang akan menunjuk Notaris Pengganti.

7. Pelaksanaan pengawasan jabatan Notaris

Pengawasan atas pelaksanaan jabatan Notaris membutuhkan pendanaan yang cukup. Oleh karena itu, dalam perubahan ini, pendanaan atas majelis pengawas ditegaskan lagi dan diberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengaturnya. Selain itu, ditambahkan pula ketentuan pembentukan majelis pengawas gabungan untuk beberapa kabupaten manakala terdapat jumlah Notaris dalam satu kabupaten lebih sedikit daripada jumlah anggota majelis pengawas

Tambahan pasal 16A dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai kewajiban yang dimiliki oleh calon notaris yang sedang magang di kantor notaris menimbulkan kebingungan dengan frasa yang terdapat didalamnya.

Pasal 16A ayat (1) menyebutkan kewajiban notaris magang yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan:

“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Pasal 16A ayat (2) tersebut diatas, terdapat frasa yang membingungkan, yaitu frasa “calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta”. Penjelasan pasalnya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata “akta yang dibuatnya” dalam penjelasannya hanya menyebutkan cukup jelas.

Dari bunyi pasal diatas maka menurut hemat penulis dapat dimaknai bahwa:

1. Makna pasal 16A ayat (2) jika dilihat sepintas tanpa dilakukan penafsiran maka pasal 16A ayat (2) ini dapat bermakna calon Notaris magang berwenang membuat akta, dan berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dengan kata lain undang-undang mengakui bahwa calon notaris magang membuat akta sebagai mana akta yang dibuat oleh notaris, karena dalam pasal 16A ayat (2) tersebut mewajibkan kepada calon notaris yang sedang magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya.

Makna pasal 16A ayat (2) diatas adalah makna yang tanpa memakai metode Penafsiran terlebih dahulu, yang hanya melihat pasal 16A ayat (2) sebagai pasal tersendiri.

Makna pasal 16A ayat (2) diatas tersebut tentunya menimbulkan pertentangan norma dengan pasal 1868 KUHPdata dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN, karena calon notaris yang sedang melakukan magang tidak berwenang membuat akta otentik sebagaimana makna pasal 16A ayat (2) diatas, Notarislah yang berwenang membuat akta sebagaimana bunyi pasal 1868KUHPdata dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN. yang akan dijelaskan dalam bab tersendiri dalam pembahasan kewenangan calon notaris magang.

2. Makna pasal 16A ayat (2) UUJN menurut hemat penulis jika dilakukan dengan fenaafsiran sistematis dan historis maka bermakna calon notrais tidak berwenang membuat akta, karena kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris tidak didukung oleh pasal lain jika dilihat dari sisi fenaafsiran sistematis, justru bertentangan dengan pasal 1868KUHPdata dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN.

Dilihat dari sisi historis pembentukan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terbaru yaitu dilihat dari Naskah akademik rancangan perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga tidak memberikan kewenangan kepada calon notaris karena dalam hasil naskah akademik tersebut dijelaskan bahwa selain Penambahan masa magang yang sebelumnya lama waktu magang adalah 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (duapuluh empat) bulan, dan calon notaris magang juga mempunyai kewajiban lain yaitu berkewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2).

Sebagaimana bunyi nasakah akademik tersebut sudah jelas tidak memberikan kewenangan pembuatan akta hanya memberikan kewajiban merahasiakan akta. Lebih jelasnya akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri dalam permasalahan kedua penelitian ini yaitu kewenangan pembuatan akta oleh calon notaris magang.

2. Makna Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.

Makna pasal 16A ayat (2) sebagaimana dijabarkan diatas ditinjau dari sisi kepastian hukum maka jelas tidak terpenuhinya tujuan dari teori kepastian hukum itu sendiri, sebagaimana dijelaskan diawal hukum itu harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar aturan hukum yang dilanggar oleh subyek hukum jelas-jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak ada multitafsir atau ambigu, maupun kabur dalam makna undang-undang dan logis yaitu harus masuk akal dan tidak menimbulkan konflik norma.

Sedangkan makna pasal 16A ayat (2) UUNJN sebagaimana dijelaskan diatas tidak membrikan kepastian hukum kepada msyarakat pada umumnya dan calon notaris pada khususnya, karena makna pasal 16A ayat (2) UUNJN tersebut tidak jelas maknanya dan dapat bermakna ganda jika tanpa dilakukan penafsiran terlebih dahulu. Maka pasal 16 ayat (2) tersebut bertentangan dengan pengertian akta itu sendiri yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdato dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUNJN.

3. Analisis Pasal 16A Ayat (2) UUNJN Berkaitan Dengan Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Kepada Calon Notaris.

1. Akta outentik

Sebelum melihat apakah pasal 16A ayat (2) UUNJN memberikan kewenangan pembuatan akta kepada notaris, maka peneliti ingin menjabarkan terlebih dahulu apa itu akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata meberikan definisi akta otentik adalah

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat. Otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu saja, akan tetapi cara membuat akta otentik tersebut juga harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Apabila syarat tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka akta yang dibuat tidak dapat dianggap sebagai akta otentik melainkan hanyalah sebagai akta dibawah tangan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa syarat-syarat akta otentik, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

2. Kewajibannya Calon Notaris Magang

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa jika ingin menjadi notaris maka calon notaris harus memenuhi persyaratan yang tertera pada pasal 3 UUNJ. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan pasal 3 UUNJ yaitu harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 3 tersebut tentunya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon notaris untuk dapat diangkat menjadi notaris, selain kewajiban pasal 3 tersebut calon notaris magang juga mempunyai kewajiban tambahan yang terdapat dalam pasal 16A UUN, yaitu;

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum,

- 2) “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Berdasarkan bunyi pasal 16A maka dapat disimpulkan kewajiban calon notaris magang adalah:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

3. Kewenangan Pembuatan Akta Kepada Calon Notaris

Makna pasal 16A ayat (2) UUN sebagaimana diterangkan di atas, maka timbul pertanyaan apakah pasal 16A ayat (2) tersebut memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris. Menurut hemat penulis jawabannya tentunya tidak memberikan kewenangan, karena dari makna pasal 16A ayat (2) di atas undang-undang hanya mengakui bahwa calon notaris membuat akta serta wajib merahasiakannya, tidak memberikan kewenangan pembuatan akta, dan

pasal 16A ayat (2) tersebut tidak didukung pasal lain dalam UUJN yang memberikan kewenangan kepada calon notaris untuk membuat akta.

Disamping itu jika dilihat dari penafsiran sistematis yaitu pasal 16A ayat (2) dihubungkan dengan pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN.

Pengertian akta otentik itu sendiri yang dijelaskan dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat.

Dari pengertian akta otentik tersebut diatas yang dapat membuat akta otentik adalah pejabat umum yang berwenang serta bentuknya harus disesuaikan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, hal ini juga sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa syarat agar akta otentik disebut otentik maka:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Untuk melihat apakah pasal 16A ayat (2) memberikan kewenangan pembuatan akta otentik kepada calon notaris maka tentunya pasal 16A ayat (2) tersebut harus dihubungkan dengan unsur akta otentik yang kedua yaitu apakah calon notaris merupakan pejabat umum yang berwenang.

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.⁷ Seseorang dapat menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu, pejabat umum tersebut ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat umum adalah pejabat yang disertai tugas

⁷ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14.

untuk melayani kepentingan masyarakat.⁸ Untuk mengetahui seseorang dikategorikan sebagai pejabat umum, yaitu harus terlebih dahulu diterangkan atau dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa seseorang pejabat tersebut merupakan pejabat umum.⁹

Unsur akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, jika dihubungkan dengan calon notaris magang maka timbul pertanyaan apakah calon notaris magang merupakan pejabat umum yang berwenang. Setelah penulis meneliti ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa calon notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dan calon notaris ini tidak diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta tidak diberikan tugas untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara sebagaimana pengertian pejabat umum diatas.

Selain pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketidak wenangan calon notaris membuat akta juga tercermin dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUDN .

Pasal 1 ayat (1) dan 15 UUDN tentang kewenangan yang dimiliki oleh notaris menyebutkan bahwa: notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik, hal ini juga diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) UUDN, yang berbunyi yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁸ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 13.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

Pasal 1 ayat (1) dan 15 UUJN sudah jelas menerangkan bahwa yang berwenang membuat akta sebagaimana di sebutkan diatas adalah notaris bukan calon notaris. Jikapun pasal 16A ayat (2) UUJN memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris maka tentunya terdapat pertentangan norma antara pasal 16A ayat (2) dengan pasal Pasal 1 ayat (1) dan 15 UUJN.

4. Kewenangan Pembuatan Akta Kepada Calon Notaris Dilihat Dari Sisi Historis Kemunculan Pasal 16A Ayat (2) UUJN.

Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang no 2 tahun 2014, dalam hasil pembahasan disebutkan bahwa:

Dalam ketentuan ini, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.¹⁰

Dilihat dari hasil pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut diatas sudah jelas menyebutkan bahwa notaris magang mempunyai kewajiban yang sama seperti notaris, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2).

Menurut hemat peneliti maka kewajiban merahasiakan tersebut adalah merahasiakan akta-akta yang calon notaris draf atas pekerjaan yang diberikan dalam masa magang dari Notaris tempat calon notaris

¹⁰ Arsip dan Dokumentasi, **Naskah Akademik Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2013, hlm. 45.

melakukan magang, jadi dengan kata lain notarislah yang membuat akta sedangkan calon notaris hanya membantu mengkonsepkan atau mendraf akta yang akan tetap disahkan oleh notaris yang bersangkutan.

5. Kewenangan Pembuatan Akta Kepada Calon Notaris Berdasarkan Teori Kewenangan

Wewenang atau sering kita temukan dengan istilah kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Hukum administrasi mengatur mengenai cara memperoleh kewenangan yang biasa diperoleh secara atribusi, delegasi, mandat. Berdasarkan UUDN pasal 1 ayat 1 dan pasal 15 ternyata notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diberikan atau diciptakan oleh UUDN sendiri.

Sedangkan sumber wewenang yang dimiliki oleh calon notaris menurut hemat penulis yaitu:

1. Wewenang calon notaris jika dilihat dari pasal 16A ayat (2) maka wewenangnya adalah wewenang atribusi. Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang berasal dari pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan.

Sebagaimana bunyi teori kewenangan atribusi tersebut jika dihubungkan dengan pasal 16A ayat (2) UUDN maka sudah jelas wewenang yang dimiliki oleh calon notaris berdasar pasal tersebut adalah wewenang atribusi, karena kewenangan pembuatan akta otentik kepada calon notaris diberikan langsung oleh undang-undang jabatan notaris karena makna pasal 16A ayat (2) tersebut dapat bermakna memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris.

2. Berbeda dengan wewenang pertama, sebagaimana diuraikan diatas yang mana setelah dilakukan penafsiran-penafsiran ternyata makna pasal 16A ayat (2) yang sesungguhnya yaitu calon notaris hanya berwenang mendrafpack atau mengkonsepkan akta, dengan demikian jika dihubungkan dengan teori kewenangan, maka dapat ditemukan atau disimpulkan bahwa tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh calon notaris yang sedang magang, karena proses pendrafan oleh calon notaris bukanlah pelimpahan wewenang akan tetapi hanya sebuah tugas yang diberikan oleh Notaris kepada calon notaris.

Tugas tersebut merupakan pembelajaran atau dalam proses pekerjaan yang ditugaskan oleh Notaris kepada calon notaris, yang nantinya draf akta tersebut yang dikonsep oleh calon notaris akan tetap disahkan oleh Notaris itu sendiri.

Setiap peraturan perundang-undangan haruslah jelas serta tidak terdapat tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan atau pasal lain agar kepastian hukum suatu undang-undang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Berdasarkan teori kepastian hukum maka pasal 16 ayat (2) UUJN tidak memenuhi teori yang menjadi dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan yaitu kepastian hukum. Karena pasal 16 ayat (2) jika salah penafsiran dapat menimbulkan kekaburan makna serta pertentangan norma dengan pasal 1868 KUHPdata serta pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN, seharusnya sesuai dengan teori kepastian hukum, haruslah suatu peraturan perundang-undangan jelas dan tidak terdapat kekaburan makna yang menimbulkan kebingungan terhadap pembaca undang-undang.

6. KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH CALON NOTARIS

Pasal 1868 BW menyatakan bahwa "Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat". Menurut Pasal 1868 BW, agar suatu akta memiliki stempel otentisitas haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini, yaitu;

- a. akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1868 KUHPdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan pejabat umum itu berwenang, secara implicit pasal 1868 KUHPdata menghendaki adanya undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk aktanya. Pasal 1 ayat 1 UUDN menyebutkan:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, notaris dikualifikasikan seagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)¹¹ juga diberikan kualifikasi sebagai pajabat umum dan pejabat lelang.¹²

Otentik atau tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 13.

ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Timbul pertanyaan bagaimana jika ada akta yang dibuat oleh calon notaris dengan dasar kewenangan pasal 16A ayat (2) UUDN, menurut hemat penulis sebagaimana dijelaskan diatas bahwa calon notaris hanya membantu notaris mendrafkan akta otentik bukan berwenang membuat akta otentik.

Maka akta yang dibuat oleh calon notaris hanya berfungsi sebagai keterangan, karena para pihak hanya mendapatkan salinan akta yang hanya ditandatangani oleh calon notaris, karena calon notaris tidak berwenang maka salinan yang diberikan atau dipegang oleh para pihak hanya menjadi surat keterangan. Mengapa peneliti menyimpulkan tidak menjadi akta dibawah tangan karena, salinan yang diberikan oleh calon notaris tidak memenuhi pasal 1869KUHperdata yang menyebutkan:

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”

Sebagaimana bunyi pasal 1869 KUHPerdata tersebut diatas untuk dapat disebut sebagai akta dibawah tangan maka terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu surat tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, akan tetapi salinan yang diberikan oleh calon notaris jika calon notaris membuat akta berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh UUDN maka calon notaris hanya meberikan salinan kepada para pihak yang mana salinan tersebut hanya ditandatangani oleh calon notaris tersebut, dengan alasan tersebut maka penulis simpulkan salinan yang diberikan kepada

para pihak hanya berlaku sebagai keterangan, tidak akta dibawah tanggungan.

Sedangkan minuta aktanya yang dibuat oleh para pihak yang telah ditandatangani oleh mereka maka menjadi akta dibawah tangan sebagaimana bunyi pasal 1869KUHPerdato.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Makna pasal 16A ayat 2 yang terkandung dalam frase “calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta” adalah:

Notaris magang membuat akta, serta berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dengan kata lain undang-undang mengakui bahwa calon notaris membuat akta dan berkewajiban merahasiakannya.

2. Pasal 16 A ayat (2) tidak memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris, karena sebagaimana dilihat dari pengertian akta pasal 1868 KUHPerdato unsur-unsurnya tidak dipenuhi oleh calon notaris, calon notaris bukan merupakan pejabat yang berwenang, serta jika pasal 16A ayat (2) memberikan kewenangan tentunya akan terdapat pertentangan norma dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUDN mengenai kewenangan pembuatan akta yang dimiliki oleh notaris. Dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang penulis teliti dari risalah rapat serta naskah akademik juga tidak memberikan kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris, karena disebutkan bahwa selain penambahan masa magang yang sebelumnya waktu magang 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (duapuluh empat) bulan, calon notaris magang juga mempunyai kewajiban lain yaitu berkewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya, bukan

kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, 2001, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.
- E. Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisivs, Yogyakarta.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1983, **Peraturan Jabatan Notaris**, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2011, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaries**, Pt Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Habib adjie, 2009, **Sekilas Dunia Notaries Dan Ppat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta.
- Jazim hamidi, 2011, **Hermeneutika Hukum, Sejarah – Filsafat & Meode Tafsir**, UB Press, Malang.
- Ridwan H.R., 2006, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Masyhur Efendi, 1994, **Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**

Penjelasan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**

KUHPerdata

Artikel Internet

Anonymous, **Notaris/ PPAT Dan Fungsinya**, herman-notary.com, diakses pada tanggal 2 april 2014 Pukul 20.00 WIB.